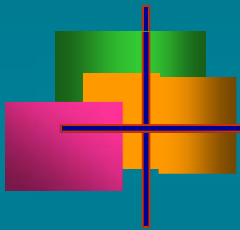


**MATERI KULIAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (ASP)
MODUL -01
RUANG LINGKUP ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK**



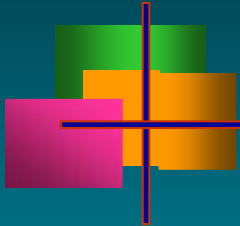
Oleh :

Muh. Arief Effendi, SE, MSi, Ak, QIA,CPMA,CA,ACPA,CACP.

**TRISAKTI SCHOOL OF MANAGEMENT
(STIE TRISAKTI) JAKARTA**

Edisi Revisi 4 – Agustus 2023

MATERI KULIAH



- 1. Pengantar mengenal dan memahami Akuntansi Sektor Publik.**
- 2. Pengantar dan memahami Organisasi Sektor Publik.**
- 3. Memahami Organisasi Sektor Publik sebagai entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.**

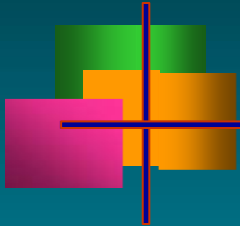
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik



Pengertian dan ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik (ASP)

- **ASP memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.**
- **Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.**
- **Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi non laba lainnya.**

Pengguna Informasi Akuntansi



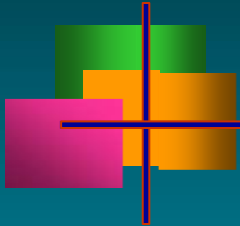
Akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Pengguna informasi :

1. Pengguna internal : manajemen organisasi tsb, sehingga muncul cabang ilmu akuntansi manajemen. Selain itu juga berkembang ilmu Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), baik SPM untuk sektor publik maupun sector bisnis.
2. Pengguna eksternal dari ilmu akuntansi , terdapat cabang ilmu akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan.

Mengingat ASP sangat berkaitan dengan anggaran, laporan keuangan utama dalam ASP adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengguna Informasi Akuntansi



Sektor Publik :

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

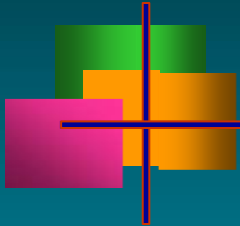
Sektor bisnis :

- a. Standar Akuntansi keuangan (SAK).
- b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Organisasi di ASP:

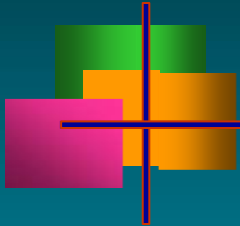
- Awalnya masih menggunakan berbasis kas (**Cash Basis**).
- Dalam perkembangannya menerapkan **Cash toward Accrual**.
- Pada akhirnya menggunakan **Accrual Basis** seperti yang berlaku di sektor bisnis, meskipun tidak sepenuhnya accrual basis.

Audit dalam Organisasi Sektor Publik



- Pada sektor publik, terutama pemerintahan terdapat Lembaga independen yang berwenang melakukan audit / pemeriksaan keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Untuk pemeriksaan organisasi pemerintah di Indonesia dikenal Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Selain itu, dilingkungan internal pemerintah juga terdapat beberapa Lembaga pemeriksa internal, yaitu Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dilingkungan Departemen/Kementerian terdapat Inspektorat. Adapun dilingkungan Pemerintah daerah terdapat Badan Pengawas Daerah (Bawasda) tingkat Propinsi atau Kabupaten/ Kota.

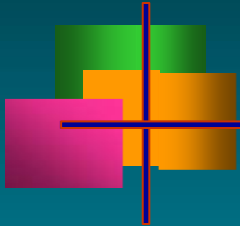
Organisasi Sektor Publik



Beberapa Organisasi Sektor Publik :

1. Pemerintah.
2. Universitas.
3. Rumah Sakit.
4. Yayasan.
5. Partai politik.

Organisasi Sektor Publik : Pemerintah

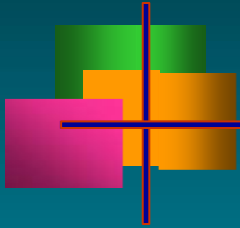


1. Pemerintah Pusat.

- Presiden.
- Lembaga Tinggi Negara yang lain:
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pemerintah Daerah.

Peran Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik



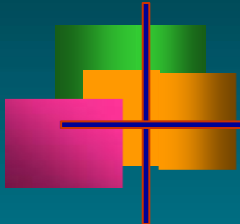
- ASP mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban.
- ASP juga sering disebut sebagai akuntansi dana, karena kekhasan dalam fokus pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik.
- Isu yang menjadi perhatian pada reformasi organisasi publik saat ini dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif adalah implementasi *New Public Management (NPM)* untuk mencapai kinerja organisasi secara optimal dengan mempertimbangkan aspek *Value for Money (VFM)*.

Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik



- Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik memiliki domain yang cukup luas dan berbagai macam bentuk, seperti entitas pemerintahan, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik (PARPOL) , Organisasi massa (ORMAS), Lembaga Keagamaan dan tempat ibadah, Lembaga Kesehatan dan Pendidikan, dan bentuk organisasi lainnya yang tidak berorientasi kepada keuntungan.
- Entitas pemerintahan merupakan entitas dalam sektor publik yang memiliki domain dan ruang lingkup paling luas, yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik



Entitas dalam Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) entitas yang memiliki fungsi yang berbeda :

a. **Entitas pelaporan.**

unit dalam struktur pemerintahan Pusat dan Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

b. **Entitas akuntansi.**

Unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan.

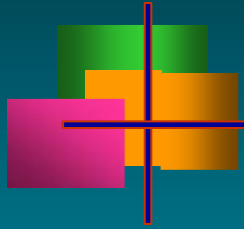
Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik

Entitas Pelaporan



- Entitas pelaporan : Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Referensi



Halim, Abdul & M. Syam Kusufi; Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor publik; Edisi 2, Salemba Empat; 2014; bab 1 & 2.

Nordiawan, Deddi & Ayuningtyas Hertianti; Akuntansi Sektor Publik; Edisi 2; Salemba Empat; 2010; bab 3.